



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 18 April 2016
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.45 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan evaluasi, pelaksanaan, proyeksi kontribusi dan rekrutmen pendamping dana desa.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dalam penyusunan regulasi mengenai rekrutmen pendamping desa dapat mempertimbangkan satu desa didampingi oleh satu Tenaga Pendamping dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya manusia di desa/kecamatan setempat serta mempertimbangkan situasi dan kondisi desa tersebut.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi mekanisme transfer dana desa agar proses transfer dana desa lebih efektif, efisien serta tepat sasaran. Sehubungan dengan hal itu, Komisi V DPR RI merekomendasikan agar dana desa ditransfer langsung ke kas desa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 18 April 2016

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,**

ttd

MARWAN JA'FAR

KETUA RAPAT,

ttd

MUHIDIN M. SAID